

**PERANAN DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN
KOPERASI DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH MELALUI RETRIBUSI PASAR DI MASA COVID-19
DI KABUPATEN MUKOMUKO PROVINSI BENGKULU**

JURNAL ILMIAH

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan pendidikan Program Diploma IV
pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri



oleh

ADITYA PRATAMA

NPP. 28.0404

Program Studi : Keuangan Daerah

INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Jatinangor, 2021

PERANAN DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI RETRIBUSI PASAR DI MASA COVID-19 DI KABUPATEN MUKOMUKO PROVINSI BENGKULU

Aditya Pratama

NPP. 28.0404

*Asdaf Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu
Program Studi Keuangan Daerah*

Email : adityablack17@gmail.com

ABSTRACT

Increasing Local Own Revenue in the sector of receiving local fees, in this case the Market Service Retribution, local governments make many policies ranging from increasing revenue to coordinating with other agencies. The purpose of this research is to find out how the Role of the Office of Industry, Trade and Cooperatives in Increasing Local Revenue through Market Retribution and to find out the various obstacles and efforts that have been made by the Office of Industry, Trade and Cooperatives of Mukomuko Regency. This research is a qualitative research and uses descriptive methods and an inductive approach. Data collection techniques used by the author are observation, interviews and documentation. Meanwhile, the analysis technique that the writer uses is data reduction, data presentation, and drawing conclusions and verification. Based on the results of the analysis, the authors found that the management of Market Levies is still not good in its implementation. The obstacles are the ability of human resources as well as in the budget, the location is far enough away so that it is difficult to monitor, the absence of new regulations to strengthen the revenue process, and the absence of a Market Upgrade to manage markets. The suggestion that can be given by the author is to make the market a top priority in order to get funds for development or repair, forming a Market Uptd to manage the market in order to get full results from market retribution, making related regulations to increase income and instill civil service values for each. components of employees of the Office of Industry and Trade and Small and Medium Enterprises of Mukomuko Regency.

Keywords: *The Role, Market Service Retribution, Covid-19*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peranan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Retribusi Pasar dan untuk mengetahui berbagai hambatan serta upaya apa yang telah dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Ukm Kabupaten Mukomuko. Penelitian ini menggunakan teori Soekanto (2012:212), penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan menggunakan metode deskriptif serta pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu observasi, wawancara serta dokumentasi. Sedangkan teknik analisis yang penulis gunakan yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan hasil analisis, penulis mendapatkan bahwa pengelolaan Retribusi Pasar masih belum baik dalam pelaksanaannya. Penghambatnya adalah kemampuan Sumber Daya baik manusia maupun anggaran, lokasi yang cukup jauh sehingga susah dimonitor, belum adanya peraturan baru untuk memperkuat proses penerimaan, dan belum adanya Uptd Pasar untuk mengelola pasar. Saran yang dapat diberikan penulis adalah membentuk Uptd Pasar untuk mengelola pasar supaya mendapatkan hasil penuh dari retribusi pasar, memberikan pegawai pendidikan dan pelatihan sesuai tugas pokok dan fungsinya, membuat peraturan yang terkait untuk meningkatkan pendapatan Dinas Perindagkop dan Ukm Kabupaten Mukomuko.

Kata Kunci: Peranan, Retribusi Pasar, Covid-19

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dunia. Tentunya diperlukan pembangunan yang merata ke seluruh pelosok tanah air. Tanggung jawab tersebut tidak hanya dibebankan kepada pemerintah pusat, namun juga kepada pemerintah daerah seiring dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan tentang otonomi daerah. Dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa “pemerintah dan masyarakat diberikan wewenang, hak, dan kewajiban dalam mengurus rumah tangga pemerintahannya dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Oleh karena itu, untuk melaksanakan otonomi daerah yang sukses, dinamis, benar, dan bertanggung jawab, perlu dilakukan upaya pembinaan dan peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan sebaik-baiknya. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, PAD memegang peranan penting, sehingga pendapatan asli daerah diharapkan menjadi sumber utama anggaran daerah. Sektor pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah. Besarnya penerimaan pajak daerah dan pembagiannya berbeda-beda untuk tiap daerah, tergantung potensi dan pengelolaan daerahnya.

Adapun bentuk-bentuk retribusi daerah yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perijinan tertentu. Retribusi jasa umum adalah retribusi yang disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pemanfaatan umum, sehingga dapat dinikmati oleh perseorangan atau pribadi. Pelayanan pasar merupakan salah satu bentuk pemberian pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan tersebut diberikan oleh pemerintah daerah kepada pengguna sarana dan prasarana pasar. Semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa pemerintah daerah, maka pendapatan retribusi daerah juga akan meningkat.

Salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu yang meningkatkan Pendapatan asli Daerah (PAD) melalui potensi pasar rakyatnya yaitu Pemerintah Kabupaten Mukomuko. Pasar kabupaten mukomuko merupakan pasar yang dibangun dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dengan berupaya membangun infrastruktur yang memadai dan diharapkan dapat memicu peningkatan ekonomi masyarakat sekitar.

Setiap tahunnya, retribusi pelayanan pasar berperan dalam meningkatkan Pendapatan asli Daerah kabupaten Mukomuko, karena setiap tahunnya Pemerintah Kabupaten Mukomuko mempunyai target yang harus dicapai dari penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar tersebut. Pencapaian target Retribusi Jasa Umum tersebut tidak terlepas dari partisipasi masyarakat atau pengguna jasa dari fasilitas dan prasarana pasar di Kabupaten Mukomuko.

1.2 Permasalahan

Walaupun mengalami peningkatan namun pendapatan yang didapat oleh Disperindag Kabupaten Mukomuko masihlah rendah apabila dibandingkan dengan Kabupaten-kabupaten lain yang memiliki Uptd pasar yang menarik retribusinya langsung. Perbandingannya antara pasar yang diurus langsung oleh Uptd Pasar dengan yang diurus oleh Desa sangatlah jauh, memang bukan hanya diurus oleh Uptd pasar menjadikan perbandingan pendapatan retribusi pasar di Kabupaten Mukomuko dengan pasar di Kabupaten lainnya tentu ada juga faktor lain seperti jumlah pasar yang ditarik retribusinya, jumlah penduduknya dan kebijakan tentang penarikan retribusi pasar.

Tetapi apabila tidak menggunakan Uptd pasar dan menyerahkan semua ke Desa untuk penarikan retribusi pasar maka Disperindag akan menjadi pihak ketiga dalam penerimaannya, karena dari Desa memberikan kontrak kepada masyarakat yang ingin mengurus pasar dan menyerahkan uang yang telah disepakati dan desa menyerahkan uang retribusi ke Disperindag, sehingga uangnya sudah kepotong dua kali dari hasil retribusi awal. *Covid-19* atau yang biasa dikenal dengan virus corona merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan. Beberapa virus dapat menginfeksi manusia dan menimbulkan berbagai macam penyakit, mulai dari penyakit umum seperti flu, penyakit saluran pernafasan ringan, infeksi paru-paru yang parah, demam bahkan hingga kematian. Cara terbaik untuk melindungi diri sendiri adalah menghindari kondisi atau tempat dimana mungkin terpapar virus. Hal tersebut mendorong banyak negara, termasuk Indonesia, menerapkan kebijakan yang bertujuan memperkuat *lockdown* guna mencegah penyebaran virus corona.

Kebijakan ini tak hanya berdampak pada kesehatan manusia namun juga berdampak kepada sosialisasi dan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Terkait dampak ekonomi karena virus *Covid-19*, DPR meminta pemerintah dapat memprioritaskannya pada penguatan daya beli masyarakat, realokasi anggaran juga bisa dimanfaatkan pada program-program penguatan daya beli masyarakat. Terkait hal ini banyak pemerintahan daerah yang memberikan keringanan bagi para pelaku usaha melalui penghapusan sejumlah pajak dan retribusi daerah di tengah merebaknya virus corona ini. Hal ini merupakan langkah pemerintahan daerah untuk membantu masyarakat di tengah situasi ketidakpastian ekonomi akibat *Covid-19*.

Walaupun demikian, namun persentase penerimaan Pendapatan asli Daerah melalui retribusi pasar tahun ini masih lah mengalami penurunan. Pemerintah daerah masih saja dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang datang silih berganti, pemerintah daerah pun terus berupaya menindaklanjuti permasalahan yang terjadi dan terus melakukan perbaikan-perbaikan. Melihat situasi yang terus menerus terjadi di

lapangan, masih ada ditemukan beberapa kios dan los yang belum digunakan atau kosong, pasca merebaknya penyebaran virus *Covid-19* sangat berpengaruh terhadap aktivitas pasar. Pasar sepi karena bukan hanya jumlah pedagang yang menurun begitu juga pembeli mulai menurun. Tentunya hal ini akan menjadi masalah besar karena akan mengurangi jumlah pemungutan retribusi sehingga tidak akan mencapai target tahunan yang telah ditetapkan.

Pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada pemerintah daerah dalam pengelolaan pasar-pasar di Kabupaten Mukomuko. Oleh karena itu, semakin baik pengelolaan pasar maka akan berdampak baik pula pada pengembangan penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Mukomuko. Namun pengelolaan retribusi pasar dirasakan belum optimal dikarenakan tingkat pengawasan dalam pelaksanaan retribusi pasar masih rendah.

1.3 Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, retribusi pasar dan Pendapatan Asli Daerah. Penelitian Setyaningsih dan Aviningrum berjudul Evaluasi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Surakarta (Setyaningsih dan Aviningrum, 2009) Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama lima tahun anggaran yaitu 2003 sampai dengan 2007, kontribusi retribusi pasar mengalami penurunan tiap tahun, yang disebabkan pembangunan minimal empat pasar pada tiap tahunnya. Tingkat pertumbuhan retribusi pasar terendah sebesar -2,40% terjadi pada tahun 2004, dan tertinggi terjadi pada tahun 2005 yaitu sebesar 22,66%. Rata-rata tingkat pertumbuhannya adalah sebesar 8,24%. Realisasi penerimaan retribusi pasar dengan target yang telah ditetapkan oleh Dinas Pengelolaan Pasar di Surakarta sudah efektif, karena rata-rata penerimaannya lebih dari 100% dari target yang telah ditetapkan. Penelitian Indri Fitria Sari berjudul Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Pasar dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Solok (Indri Fitria Sari, 2017) Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah mengalami penurunan sebesar 0,01 persen. Kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Solok tiap tahunnya dikategorikan sangat kurang atau rendah. Rata-rata efektifitas pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Solok dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 sebesar 212,04 persen. Jika dilihat pertahunnya, pada tahun 2011 dan 2012 yang realisasi penerimaan retribusi pasar mencapai 94,17 % dan 96,67 %, masuk dalam kategori efektif. Pada tahun 2013 dan 2014 realisasi penerimaan retribusi pasar mencapai 298,33 % dan 359 % dikategorikan sangat efektif. Penelitian Sutri Handayani yang berjudul Potensi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lamongan (Sutri Handayani, 2017) Hasil penelitian menunjukkan bahwa Potensi retribusi pasar terhadap peningkatan PAD, yang dilihat dari potensi penerimaan retribusi pasar dari setiap unit pasar, telah menunjukkan hasil bahwa dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pasar tiap tahun yang di dapat sangat berbeda jauh yaitu selalu dibawah potensi. Sehingga penerimaan yang seharusnya bisa lebih tinggi menjadi berkurang dikarenakan pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dirasa masih kurang maksimal. Jadi kriteria potensi penerimaan retribusi pasar kurang berpotensi. Dan efektivitas pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Lamongan dengan rata-rata sebesar 105,30%, hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata pemungutan retribusi pasar sudah berjalan secara efektif. Kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Lamongan rata-rata sebesar 1,85% dengan kriteria kurang berkontribusi. Penelitian Nur Anisa Megawati yang berjudul Kontribusi Retribusi

Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidoarjo (Nur Anisa Megawati, 2016) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi retribusi pasar berbeda jauh dengan realisasi penerimaan retribusi pasar yang selisihnya mencapai Rp. 4.537.202.701,25. Kontribusi retribusi pasar terhadap PAD “Sangat Kurang” dengan rata-rata kontribusi setiap tahunnya hanya sebesar 1,82%. Kemudian prospek penerimaan retribusi pasar pada tahun 2015-2022 terjadi peningkatan yang positif dengan slope yang tidak terlalu curam. Penelitian yang berjudul Penerimaan Retribusi Pasar Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tidore Kepulauan (Dessy Ayuni M. Toduho, David Paul Elia Saerang dan Inggriani Elim, 2014) Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang mencapai tingkat efektifitas hanya pada tahun 2013 sedangkan tahun 2009-2012 belum efektif. Kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah rata-rata 11,64% kemudian kontribusi retribusi pasar terhadap PAD rata-rata 5%. Walaupun kontribusi terhadap retribusi daerah dan PAD relatif kecil namun cukup berarti dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Sebaiknya pimpinan Dinas Pendapatan Daerah Kota Tidore, Melakukan identifikasi dan registrasi ulang terhadap wajib retribusi sehingga di dapat data yang akurat serta memudahkan untuk mengidentifikasi proporsi retribusi daerah.

1.4 Pernyataan Terbaru Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian tertentu, dimana konteks penelitian dilakukan di masa pandemi *Covid-19* yang mana belum pernah dilakukan sebelumnya, variabel yang digunakan yaitu Peranan karena yang diteliti adalah bagaimana peranan Dinas terkait untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Retribusi Pasar, tentunya indikator-indikator dan pembahasannya akan sangat berbeda dan hasil akhir yang dicapai pun akan berbeda.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hambatan dan Upaya serta Peranan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dalam Meningkatkan Pendapatan asli Daerah melalui retribusi pasar di masa *Covid-19* di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu.

II. METODE

penulis dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan dengan pendekatan induktif (Sugiyono,2005). penulis mencoba menggambarkan secara cermat bagaimana suatu peristiwa dapat terjadi, obyek yang diteliti dan dianalisis melalui suatu penjelasan argumentatif yang memuat proses penalaran dan penafsiran yang bertolak dari kaidah hukum yang umum, dan selanjutnya dapat ditarik kesimpulan berupa pernyataan-pernyataan umum kemudian dikaitkan dengan teori yang relevan dan sesuai.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara dan Dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 10 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Perindag, Sekretaris Dinas Perindag, Kepala Subbagian Keuangan Disperindag, Kepala Bidang Perdagangan, dan Pemilik Lapak di Pasar (6 Orang). analisisnya menggunakan teori Peranan yang digagas oleh Soekanto (2012) yang menyatakan bahwa Peranan itu adanya Kedudukan dan Tugas.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan

Kedudukan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi disini adalah sebagai dasar pembentukan dan atau pembuat kebijakan. Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu, kebijaksanaan yang dimaksudkan dalam cara pencapaian tujuan dan sasaran harus disusun oleh organisasi dengan berdasarkan dari pimpinan pucuk organisasi. Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi maka penyusunan strategi dan kebijakan organisasi menjadi sangat penting terutama dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Namun membuat kebijakan tidaklah mudah sesuai yang diinginkan, banyak pertimbangan yang harus dikomunikasikan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Ukm Kabupaten Mukomuko didapatkan bahwa Dinas Disperindagkop telah mempunyai strategi dan kebijakan supaya pendapatan dari penarikan retribusi pasar bisa meningkat terus setiap tahunnya. Strategi dan kebijakannya itu diambil dari tujuan dan sasaran Dinas Disperindagkop jangka menengah maupun jangka panjang yang telah ditetapkan.

3.2 Tugas

Adapun tugas dan fungsi pokok Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko sebenarnya sudah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko nomor 33 Tahun 2016 yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

1. Meningkatkan Pendapatan

Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa penempatan bangunan/los/kios menjadi sumber penerimaan tertinggi dari retribusi pelayanan pasar. Ini menjadi langkah yang baik bagi Dinas Perindagkop dan Ukm Kabupaten Mukomuko dalam memanfaatkan peluang atau kesempatan untuk mengembangkan potensi ini.

2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia

Penulis menganalisis bahwa Dinas Perindagkop dan Ukm Kabupaten Mukomuko memiliki sumberdaya manusia yang cukup baik akan tetapi tidak memiliki karakteristik sumberdaya manusia yang baik sehingga potensi atau kompetensi yang dimiliki tidak dapat digunakan secara maksimal untuk menyelesaikan permasalahan retribusi pelayanan pasar yang sering terjadi khususnya dalam hal memperkuat proses penerimaan retribusi pelayanan pasar.

3. Mempermudah Administrasi

Hasil dari tentang efisiensi administrasi retribusi pelayanan pasar, penulis menganalisis bahwa Dinas Perindustrian dan Ukm Kabupaten Mukomuko melakukan hal yang tepat ketika membenahi kebijakan yang belum berjalan dengan baik. Secara keseluruhan semua pihak diuntungkan dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.

4. Melakukan Monitoring

Melakukan monitoring berupa Meningkatkan pengawasan dan pengendalian juga juga termasuk tugas Disperindag untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan dapat berjalan lebih baik dan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pada akhirnya untuk melakukan monitoring dibutuhkan upaya-upaya yang dapat berguna dan bermanfaat dalam menunjang pelaksanaan tersebut.

5. Melakukan Koordinasi dengan Intansi Lain

Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa terdapat banyak dampak positif juga negatif yang dirasakan oleh masyarakat selaku pengguna jasa layanan pasar dengan adanya keterlibatan pihak lain dalam membantu pemerintah menjalankan fungsi

pengawasan serta ketertiban di pasar. Dampak positif dan negatif akan selalu terjadi dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan. Namun penulis menilai bahwa seluruh dampak yang dirasakan oleh pengguna jasa layanan pasar berfungsi untuk mendorong mereka melakukan inovasi-inovasi untuk mengembangkan usaha mereka agar memiliki nilai saing yang baik serta memberikan keuntungan bagi mereka.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penulis menemukan faktor penyebab mengapa pendapatan dari hasil Retribusi Pasar di Kabupaten Mukomuko secara garis besar terbilang sangat kecil dibandingkan dengan Kabupaten-Kabupaten lainnya hal ini dikarenakan di Kabupaten Mukomuko tidak ada Uptd pasar yang turun langsung mengurus pasar melainkan diurus oleh Desa dimana Pasar tersebut berada. Perbandingannya antara pasar yang diurus langsung oleh Uptd Pasar dengan yang diurus oleh Desa sangatlah jauh, memang bukan hanya diurus oleh Uptd pasar menjadikan perbandingan pendapatan retribusi pasar di Kabupaten Mukomuko dengan pasar di Kabupaten lainnya tentu ada juga faktor lain seperti jumlah pasar yang ditarik retribusinya, jumlah penduduknya dan kebijakan tentang penarikan retribusi pasar. Tetapi apabila tidak menggunakan Uptd pasar dan menyerahkan semua ke Desa untuk penarikan retribusi pasar maka Disperindag akan menjadi pihak ketiga dalam penerimaannya, karena dari Desa memberikan kontrak kepada masyarakat yang ingin mengurus pasar dan menyerahkan uang yang telah disepakati dan desa menyerahkan uang retribusi ke Disperindag, sehingga uang nya sudah kepotong dua kali dari hasil retribusi awal.

3.4 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Perbandingan pendapatan hasil dari Retribusi Pasar di masa *Covid-19* dan sebelum adanya pandemi *Covid-19* yang diterima oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi tidaklah menurun akan tetapi petugas yang menarik retribusi langsung dari pedagang sangatlah merasakan dampak penurunan pendapatan yang didapatkan, hal ini dikarenakan di awal Tahun sebelum masuknya *Covid-19* di Kabupaten Mukomuko sudah melakukan kesepakatan harga setoran perbulan hingga akhir tahun melalui Mou yang telah disepakati bersama, Mou ini tidak bisa di ubah sampai kesepakatan di awal tahun berikutnya. Sehingga pendapatan yang masuk ke Disperindag tetaplah seperti biasa bahkan meningkat dari tahun sebelumnya.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Peranan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dalam Meningkatkan Pendapatan asli Daerah Melalui Retribusi Pasar Di Masa *Covid-19* Di Kabupaten Mukomuko belum berjalan dengan baik, karena masih mempunyai beberapa hambatan. Baik hambatan yang sudah ada solusi atau sedang diupayakan untuk diperbaiki maupun hambatan yang belum adanya upaya untuk diperbaiki. Karena permasalahan atau hambatan yang ada tidak bisa diperbaiki hanya oleh pemerintah saja akan tetapi juga partisipasi dari masyarakat.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan di beberapa pasar karena lokasi pasar antar pasar yang cukup jauh.

Arah Masa Depan Penelitian. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan mengapa di

Kabupaten Mukomuko tidak dibuat Uptd pasarnya agar mendapatkan hasil yang maksimal.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Mukomuko Bapak H. HERLIAN, Sos., M.Si, Ibu Nurdiana, SE, M.A.P selaku Sekretaris Dinas, Bapak Antoni selaku Kepala Bidang Perdagangan yang juga selaku pembimbing lapangan yang telah memberikan kesempatan dan membantu pada pelaksanaan magang dan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Arikunto, Suharsimi. 2005. *Manajemen penelitian*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- _____, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rinaka Cipta.
- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Herlina, Rahman. 2005. *Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta: PT. Refika.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Mankiw, N. Gregory. 2007. *Makro Ekonomi, Edisi ke-6*. Jakarta: Erlangga.
- Moleong, Lexi J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung PT Remaja Rosdakarya..
- Mulyadi, Mohammad. 2014. *Metode Penelitian Praktis Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta Utara: PublicaInstitute.
- Nazir, Moh. 2011. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Saragih, Juli Panglima. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Soekato, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*, Bandung: Alfabeta.
- Sugianto. 2008. *Pajak dan Retribusi daerah*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo).
- Sunarto. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: Amus Yogyakarta dan Citra Pustaka Yogyakarta.
- Siagian, Sondang P. 1997. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Thoha, Mifta. 2012. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Veithzal Rivai. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori Ke Praktek, Rajagrafindo persada*, Bandung.
- Warsito. 2001. *Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta : PT. Rajawali Grafindo Persada

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor RI 23 Tahun 2014. Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009. Pajak Daerah dan Retribusi daerah
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 15 Tahun 2011. Retribusi Pelayan
Pasar

C. Lain-Lain

RPJMD Kabupaten Mukomuko

<https://www.kompasiana.com/georgewidianto/5ed8a58d097f364d0346f593/dampak-Covid-19-pada-kehidupan-sehari-hari>

<https://www.alodokter.com/virus-corona>